

Sekarat Demokrasi



Teuku Kemal Fasya. Foto : Ist

Teuku Kemal Fasya

Dua profesor Departemen Perbandingan Politik Harvard University, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, pada 2018 menuliskan buku *How Democracies Die*, yang menggambarkan tentang gelombang kemunduran demokrasi pada milenium ketiga, terutama di Amerika Serikat.

Salah satu sebab hadirnya buku itu adalah dampak terpilihnya Donald Trump sebagai presiden ke-45 (20 Januari 2017 – 20 Januari 2021). Mereka menganggap itu sebagai babak sejarah terburuk pemilihan presiden AS, dengan pelbagai proses keterpilihan dan analisis tentang kebijakan mereka pada satu tahun pertama. Bukan hanya Trump, tapi juga beberapa pemimpin negara sebelumnya, menjadi racun demokrasi. Mereka adalah sosok populer di media massa dan media sosial, tapi bukan kader partai politik. Mereka merintis karir sebagai sosok populis yang tidak cukup fasih memahami demokrasi bahkan pemerintahan.

Buku ini memberikan sinyal pada pemerintahan di dunia, terutama yang terjadi di Argentina, Brazil, Ghana, Nigeria, Pakistan, Peru, Thailand, Turki, Uruguay, dan Yunani. Mereka pemimpin non-politikus, tidak lahir dari aktivisme demokrasi yang kemudian mengkhianati nilai-nilai demokrasi beberapa saat setelah berkuasa.

Kerusakan demokrasi yang dicatat oleh Levitsky/Ziblatt memang memasukkan kasus Trump yang baru satu tahun berkuasa. Mereka belum sempat mencatat buruknya karakter kepresidenan Trump yang sempat dimakzulkan dua kali oleh DPR AS, pada 2019 dan 2021. Pemakzulan kedua terjadi setelah ia menyerukan pemberontakan sipil menolak hasil Pemilu 2020.

Empat Perilaku Otoriter

Levitsky/Ziblatt mencatat indikator kunci dari perilaku otoriter Trump yang kemudian diduplikasi banyak pemimpin negara lain. *Pertama*, sebagai presiden ia dianggap tidak peduli terhadap konstitusi dan aturan main demokratis. Tercatat, Trump ikut mengajak pemberontakan sipil untuk mengepung Capitol Hill. Saat itu para pemberontak memang berhasil memasuki gedung rakyat itu, meskipun tak berhasil melakukan gerakan bersenjata.

Kedua, Trump menyangkal legitimasi lawan politik. Ia menggunakan pola wicara insinuatif untuk mendeskreditkan lawan-lawan politiknya dan menganggap mereka ancaman bagi eksistensi negara. Trump sama sekali tidak mengajarkan rivalitas yang sehat, malah menjadikan lawan sebagai musuh yang harus dimusnahkan. Kemampuan berdebat Trump buruk, menjadikan ia lebih mirip propagandis dibandingkan penyalur gagasan demokrasi.

Ketiga, ia menoleransi penggunaan siasat licik untuk mencapai tujuan. Perilaku Trump ini jelas kemudian diikuti beberapa pemimpin dunia yang terpilih melalui jalur pemilu dengan menguasai media massa, mengakali kaum preman, dan memprovokasi milisi agama untuk membungkam oposisi dan gerakan demonstrasi damai. Ketika kekerasan dan perpecahan sosial terjadi, mereka cuci tangan. Padahal setiap kekerasan fisik-massal selalu dimulai dengan motivasi-sugesti dari pemimpinnya yang sok bijaksana. Mereka menggerakkan massa yang marah dan cemas, dan tidak menghidupkan deliberasi demokrasi rasional dan santun.

Keempat, Trump dikenal sebagai presiden AS yang tidak ramah pada kebebasan berbicara, termasuk kebebasan pers. Ia mendukung hadirnya regulasi yang membatasi kebebasan sipil, perluasan hukum pencemaran nama baik, membatasi protes dan kritik kepada pemerintah. Pemerintahan model ini juga memuji pemerintah represif yang terjadi di masa lalu atau di tempat lain.

Pertanyaannya mengapa presiden seperti Trump, Chavez, Erdogan, Evo Morales, atau Rafael Correa bisa menjadi tokoh yang terpilih di dalam pemilu yang bebas? Itu karena mereka mampu menghidupkan isu populisme di dalam proses kandidasi dan mengalahkan para politikus partai yang telah berkeringat menghidupkan partai politik sebagai infrastruktur demokrasi. Beberapa di antaranya menggunakan keterampilan

Tanggal: 09 November 2023

Post by: [kemal](#)

Kategori: [Repository Media](#),

Tags: [Riset](#), [Media Massa](#),